

LAPORAN KEGIATAN RESES

MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2024 / 2025
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Juru Bicara :

HJ. NUR SA'ADAH, S.Pd.I.,MH

SEMARANG | 18 MARET 2025

=====

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Jl Pahlawan NO 7 Telepon (024) 8454085 PSW-123

LAPORAN HASIL PELAKSAN KEGIATAN RESES

MASA PERSIDANGAN KEDUA

TAHUN 2024 / 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DRPD PROVINSI JAWA TENGAH

JURU BICARA : HJ. NUR SA'ADAH, S.Pd.I.,MH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

- Yth. Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili;
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan, adik adik mahasiswa dan seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang berbahagia.

Pertama kami mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dengan agenda Penyampaian Laporan Reses Penjaringan aspirasi masyarakat Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 / 2025 dari Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Tengah.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, tauuladan dalam membimbing masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan iringan doa semoga kita dapat meneladani perilaku beliau. Amin Ya robbal 'alamin

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Baru saja kita menyaksikan pelantikan Gubernur Jawa Tengah, masyarakat menaruh harapan besar kepada kepala daerah terpilih agar memberikan dampak manfaat yang nyata. yaitu fungsi pemerintahan yang baik khususnya sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta mampu membawa daerahnya menjadi semakin Adil Makmur dan mencapai kesejahteraan.

Ijinkan juga kami mengucapkan selamat bekerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Bapak H. Ahmad Luthfi dan H. Taj Yasin Maemon untuk mewujudkan Jawa Tengah yang adil dan Makmur.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan, bahwa pelaksanaan Reses Anggota DPRD diantaranya adalah untuk melaksanakan peran dalam bidang pengawasan, serta memberikan informasi lain yang dipandang perlu dan sekaligus berfungsi sebagai kontrol rakyat terhadap Anggota Dewan yang diwakilkan sebagaimana disebutkan dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu kegiatan Reses Anggota DPRD merupakan perwujudan dari tugas Anggota Dewan, yaitu tugas penyerapan aspirasi dan tugas controlling terhadap kinerja eksekutif yaitu dengan menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Anggota DPRD Jawa Tengah.

Pimpinan dan Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada regulasi peraturan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang hak dan Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi / Kabupaten dan Kota.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ;
5. Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah
6. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2025 dan Rapat Pimpinan DPRD pada tanggal 3 Pebruari 2025.

Pelaksanaan Reses Masa Persidangan kedua Tahun 2024 / 2025 telah dilaksanakan oleh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal **8 – 15 Pebruari 2025** dengan kegiatan menyerap, menampung aspirasi serta memastikan program dan capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan amanat yang digariskan.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Sebelum penyampaian laporan hasil reses, terlebih dahulu kami sampaikan terlebih dahulu gambaran kondisi perekonomian secara umum di Jawa Tengah bahwa Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan perekonomian sebesar 4,96 Persen membaik sebesar 0,03 Persen dari periode tahun yang sama (*Y-on-Y*) yang mana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada saat itu sebesar 4,93 persen, namun kondisi tersebut jika dibandingkan dengan periode Kawartal IV pada tahun 2022 kondisi saat ini belum bisa menyamai capaian pada saat itu yaitu sebesar 5,24 Persen.

Bisa disimpulkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2022 sampai akhir tahun 2024 bisa dikatakan belum begitu menggembirakan dan tidak ada perkembangan yang signifikan, oelh karena itu kita berharap semoga kedepan pergerakan perekonomian Provinsi Jawa Tengah bisa kembali ***on the track*** dan mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Beberapa masukan dari masyarakat yang dapat kami peroleh berupa usulan prioritas pembangunan wilayah, diantaranya adalah Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan mutu pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, pelayanan publik yang professional serta Pemerataan pembangunan.

Secara rinci beberapa masukan dan aspirasi kami sampaikan dalam beberapa tema bidang sebagai berikut :

A. BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Dalam rangka untuk untuk mengejar ketertinggalan guna meningkatkan daya saing wilayah, Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah mendorong agar

Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah dilaksanakan dengan baik dan merata agar dapat menunjang kemajuan, meningkatkan produktivitas, serta memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia.

2. Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah di Jawa Tengah terus melakukan koordinasi kewilayahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dengan berbagai perangkat Musyawarah dan koordinasi yang ada termasuk didalamnya pola koordinasi Musyawarah Pembangunan Daerah berbasis kebutuhan wilayah.

Hal ini Penting agar kejadian melesetnya target pembangunan yang ada di Jawa Tengah dapat dihindari dan diprediksi sejak awal yang dikarenakan salah perhitungan atau perencanaan yang kurang matang.

Fraksi PKB juga mengapresiasi beberapa langkah Musrenbang tahun 2025 dan kegiatan konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder di Jawa Tengah.

3. Terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah dengan cermat dan bijaksana sehingga efisiensi anggaran yang ada tidak berdampak kepada program yang berpihak kepada rakyat kecil.
4. Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah menerima masukan pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan maupun ruas jalan baru atau pelebaran antar wilayah sebagai akses yang strategis jalan utama untuk jalur transportasi, lintas batas, jalur perdagangan dan jasa, diantaranya adalah :
 - Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan Jawa Tengah pada peringkat keempat dari sepuluh

provinsi dengan jumlah bencana banjir terbanyak. Banjir ada setiap tahunnya terlebih kasus banjir dan tanah longsor yang terjadi di tahun 2025 merata hampir di seluruh Jawa Tengah

Berdasarkan beberapa usulan dan masukan dalam forum reses menemukan permasalahan infrastruktur sistem drainase. Drainase diperlukan untuk mengalirkan limpasan air hujan dan mengurangi genangan air di jalanan. Buruknya perawatan drainase yang sudah dibangun dapat memicu tingginya sedimentasi pada saluran drainase jalan dan sungai.

Fraksi PKB mendorong selain program pembangunan infrastruktur drainase atau peningkatan jalan yang sudah ada juga bagaimana perawatan keberadaan drainase tersebut dijaga agar banjir yang terjadi di Pekalongan, Temanggung, Grobogan, Pati, Demak, Kudus, Banjarnegara, Cilacap, Kendal, Batang, Brebes dan daerah lain bisa diminimalisir.

- Pasca banjir yang terjadi di Grobogan akibat jebolnya tanggul sungai Tuntang serta banjir di Blora akibat jebolnya tanggul sungai Jragung dan sungai Wulung, masyarakat terdampak menginginkan perbaikan tanggul sungai tersebut yang seringkali berulang setiap datangnya musim penghujan, masyarakat minta pembuatan tanggul permanen agar jebolnya kedua tanggul sungai tersebut tidak terulang.
- Usulan Pembangunan Jalan / infrastruktur jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Demak sampai dengan Kabupaten Jepara dan Kudus
- Usulan Pembangunan Jalan / infrastruktur jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sragen sampai dengan Kabupaten Karanganyar

- Usulan Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi yang mengalami kerusakan di Kabupaten Cilacap, Temanggung, Wonosobo, Brebes dan berbagai wilayah di Jawa Tengah lainnya.
- Usulan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Daerah Aliran Sungai harus dipantau dengan baik, mulai dari masalah sedimentasi, abrasi, tindakan illegal Pemanfaatan Pemukiman liar dan lain sebagainya.

Diantaranya masukan dari masyarakat di sekitar Sungai Sengkrang Pekalongan, daerah aliran bengawan solo, Sungai Wulan, Sungai Serayu, Sungai Serang, Sungai Tuntang, Sungai Sungai Juwana dan Sungai Lusi Kudus.

5. Fraksi PKB Mendorong kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pembangunan pedesaan secara terpadu baik infrastruktur maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari pendekatan kewilayahan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah.

Usulan ini kami peroleh pada reses yang dilaksanakan di Pati, Kebumen, Brebes, Tegal, Klaten, Wonogiri dan Temanggung.

B. BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara **"mencerdaskan kehidupan bangsa"** yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa.

Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. rendahnya kualitas pendidikan dibandingkan daerah / negara lain tentu menghambat suplay sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan di berbagai bidang.

Terkait permasalahan pendidikan, reses Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah mendapatkan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Persoalan infrastruktur dan kesejahteraan di dunia pendidikan masih menjadi persoalan klasik seperti banyaknya sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang kelas, ruang guru, media belajar, laboratorium, perpustakaan, sarana ibadah, baik sekolah umum maupun sekolah keagamaan di Jawa Tengah yang rusak berat, sedang maupun ringan.

Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Fraksi PKB mendorong supaya ada skala prioritas pembangunan, dan pendataan yang akurat, baik sekolah negeri maupun swasta termasuk bagi kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidikanya terutama di daerah - daerah pinggiran atau pedesaan.

2. Memastikan dana stimulan tenaga pendidikan madrasah dan bantuan operasional madrasah dan keagamaan dianggarkan di APBD Jawa Tengah tahun 2025 dan terus dikawal keberadaanya.
3. Pendataan yang akurat kepada para pengajar madrasah keagamaan di berbagai daerah se Jawa Tengah agar keberadaannya mampu terjangkau dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
4. Kebijakan efisiensi anggaran Kementerian Agama (Kemenag) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025 yang menyasar pendidikan madrasah melalui pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuai banyak

persoalan akan berdampak pada operasional madrasah, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga menurunnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan merugikan peserta didik. Fraksi PKB mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengambil skema agar dampak negatif pemangkasan anggaran BOS Madrasah dapat menemukan solusi.

C. BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN NELAYAN

1. Fraksi PKB mendapat masukan dari masyarakat agar terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar memperhatikan sektor pertanian dan regenerasi petani muda sebagai sebuah pilihan pekerjaan yang menarik dan berprospek bagus dengan kemudahan informasi, pelatihan teknologi pertanian, pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pelatihan ketrampilan usaha tani dan kebutuhan lainnya.

(Reses di Kabupaten Pati, Rembang, Brebes, Karanganyar, Demak, Purworejo, Kendal dan Batang)

2. Kelangkaan maupun jalur distribusi pupuk pertanian hampir merata di seluruh Jawa Tengah, masalah ini sudah lama tak kunjung bisa diselesaikan. Fraksi PKB tak henti hentinya untuk menyuarakan kegelisahan para petani khususnya soal distribusi pupuk yang mudah, murah dan cukup

(Reses di Kabupaten Batang, Rembang, Kendal, Sragen, Demak, Banjarnegara dan Cilacap)

3. Fraksi PKB DPRDD Jawa Tengah mendorong Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Petani yang mengalami kegagalan panen akibat cuaca buruk, banjir, bencana alam, hama dengan meningkatkan peran

penyuluh pertanian serta pemberian kemudahan dalam mengakses sarana produksi pertanian baik berupa bantuan / hibah maupun sewa dari Perusahaan Daerah bidang Pertanian.

(Reses di Kabupaten Sukoharjo, Grobogan, Blora, Semarang, Jepara, Kudus, Demak, Bannyumas, Temanggung dan Wonosobo)

4. Jalan pertanian perlu dibangun dan diperbaiki baik jalan di lingkungan persawahan dan perkebunan, agar mempermudah proses pengangkutan hasil panen para petani. Jalan pertanian adalah salah satu bagian dari Infrastruktur yang sangat vital. Jalan yang baik, memudahkan kita untuk melakukan akses pada suatu tujuan dan begitu pula sebaliknya jalan yang rusak akan sulit untuk melakukan akses pada suatu tujuan.

(Masukan ini didakami terima dari kabupaten Brebes, Batang, Pemalang, Semarang dan Wonogiri.

5. Pembangunan saluran irigasi pertanian sebagai sebuah instrumen penting dalam sistem pertanian, Fraksi PKB mendapat usulan agar pemerintah daerah melalui anggaran yang ada untuk membangun irigasi agar hasil pertanian Jawa Tengah lebih melimpah dan mampu menjadi daerah penyangga pangan nasional.

(Usul reses yag didapatkan dari Demak, Blora, Grobogan, Brebes, Pekalongan, Sukoharjo, Klaten dan Karanganyar)

6. **Sektor Peternakan,** Sektor Peternakan merupakan salah satu mata pencaharian mayoritas di Jawa Tengah khususnya di pedesaan yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat, namun demikian usaha peternakan masih mayoritas dikelola secara tradisional sehingga belum mampu memberikan keuntungan yang memadai dan juga belum mampu mencukupi kebutuhan protein hewani yang terjangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu Fraksi PKB mendorong program peternakan yang ada harus mampu menggerakkan orientasi peternakan yang modern, mampu mensuplay kebutuhan hasil ternak untuk masyarakat, menjadikan usaha peternakan sebagai kegiatan yang diminati banyak kalangan muda dan memberikan stimulus usaha untuk rakyat.

(Reses di Kabupaten Salatiga, Rembang, Pati, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Tegal dan Batang)

7. Dari sektor Nelayan, Fraksi PKB mendapat masukan dari beberapa daerah diantaranya dari **Salatiga, Rembang, Pati, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Tegal dan Batang)** agar pemerintah memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menjalankan profesinya diantaranya bantuan mendapatkan alat tangkap, subsidi bahan bakar, asuransi keselamatan nelayan dan keberadaan Pendamping / Penyuluh Nelayan yang professional.

D. BIDANG KEUANGAN DAERAH, SOSIAL DAN EKONOMI

Terkait permasalahan Keuangan daerah, Sosial dan Ekonomi kami rangkum dalam beberapa usulan masyarakat sebagai berikut :

1. Fraksi mendorong agar penerima manfaat makan bergizi gratis yang merupakan progrma pemerintah pusat juga mendata siswa dan santri madrasah keagamaan swasta dan pondok pesantren, sehingga keberadaan program MBG ini mampu dirasakan oleh semua anak Indonesia.
2. Beberapa waktu lalu sempat terjadi sedikit kegaduhan soal kebijakan mendapatkan Gas LPG 3 kg, usulan yang kami terima agar apapun kebijakan agar memudahkan rakyat bukan sebaliknya. Pemerintah agar membuat kebijakan dan aturan keberadaan agen atau pengecer Gas LPG mudah dan terjangkau.
3. Fraksi PKB mendorong adanya kemudahan investasi untuk pengembangan UMKM, industri dan pariwisata pedesaan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah,
4. Fraksi PKB mendorong kepada Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah se Jawa Tengah membuat kebijakan dan Inovasi kemudahan berwirausaha untuk masyarakat pedesaan, program pelatihan wirausaha, pelatihan digitalisasi UMKM dan lain lain.
5. Pengembangan ketrampilan berusaha untuk masyarakat pedesaan maupun kaum miskin di perkotaan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Jawa Tengah.
(Usulan dari Kota Tegal dan Surakarta)
6. Fraksi PKB juga menerima masukan berupa usulan Pembangunan fasilitas umum yang ramah dengan hak-hak penyandang disabilitas, memberikan peluang kesempatan bekerja serta perlindungan hukum atas keberadaanya.

Masukan ini kami peroleh dari Surakarta, Jepara, Kebumen, Purworejo, Karangnayar dan Grobogan

7. Usulan pembangunan dan renovasi rumah ibadah sebagai sarana sosial keagamaan dan sarana penunjang peribadatan / pendidikan di tengah masyarakat.

(Usulan yang didapatkan di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah)

Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Demikian Penyampaian Laporan hasil Reses dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa sidang Kedua tahun 2024 / 2025.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin.

**Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, 18 Maret 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

ttd

H. Abdul Hamid, S.Pd.I., M.Pd

Ketua

ttd

Ni'matul Azizah, S.H.I

Sekretaris